

PENGARUH PERAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN-SKPD TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SIGI

Heri Susilawati

Herisusi78@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The aim of this study is to seek and analyze both simultaneous and partial effect of the existence of the treasurer and the role of financial administration officials on the quality of financial reports of local government in the district of Sigi. The research applies verification approach and involves 72 responden. The tool of analysis used is mutiple linear regressions and hypothesis is tested with significance level $\alpha=0.05$. Validity test with corrected item-total correlation technique uses the minimum requirement of $r=0.3$. Reliability test uses cronbach alpha coefficient $\alpha>0.6$. The results show that the role of treasurer and financial administration officials silmutaneously has significant effect on the quality of financial reports of local government in the district of Sigi. This shown by the result of F-test with R-Square value of 0.582. In other words, 58.20% of dependent variables are affected by both independent variables; the remaining is affected by variables that are not studied. The role of treasurer significantly affects the quality of financial reports of local government in Sigi District with t-value of 0.446; the role of financial administration officials significantly affects the quality of financial reports of local government in Sigi District with t-value of 0.521.

Keywords: *treasurer, financial administration officials, and the quality of financial report.*

Reformasi pada pengelolaan keuangan daerah, telah dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN maupun APBD disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seharusnya menyajikan informasi yang berguna bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik (PP 71 2010, paragraf 26 hal 8).

Agar informasi keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi para penggunanya maka informasi harus dapat memenuhi kualitas

tertentu, informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada paragraf 35 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Karena saat ini, masyarakat mengharapkan adanya akuntabilitas publik dalam proses pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah karena masalah ini merupakan salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati (Mardiasmo, 2004:9)

Setelah diberlakukannya paket undang-undang yang berkaitan dengan tata cara pengelolaan keuangan daerah, ternyata hampir belum ada kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara maupun daerah.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan untuk LKPD tahun 2013 memberikan suatu gambaran jika dari 524 Kabupaten dan Kota hanya 456 LKPD yang layak untuk diaudit sedangkan 68 LKPD terlambat atau belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada BPK. Dari 456 LKPD menunjukkan terdapat 5.103 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan 7.173 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. (*Buku 1, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 – BPK RI*)

Sedangkan pada pemerintah Kabupaten Sigi untuk LKPD tahun 2013

mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) turun setingkat dari opini sebelumnya yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD tahun 2012. Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya pencatatan dan pelaporan yang tidak memadai untuk aset tetap, penatausahaan kas yang tidak sesuai ketentuan, penatausahaan persediaan yang tidak memadai, dan pelaksanaan belanja modal serta belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan. Temuan kasus-kasus pada pemerintah Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Hasil Temuan Pemeriksaan Semester I Tahun 2014

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1.	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	3
2.	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	7
	Sub Total	10
<i>Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan</i>		
1.	Kerugian Daerah	12
2.	Potensi Kerugian Daerah	-
3.	Kekurangan Penerimaan	3
4.	Administrasi	4
5.	Ketidakhormatan	1
6.	Ketidakefektifan	1
	Sub Total	21
	Total	31

Sumber : BPK RI - IHPS I Kabupaten Sigi Tahun 2014

Berdasarkan temuan kasus yang ada serta opini yang diraih oleh Kabupaten Sigi, terlihat bahwa laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sigi secara umum masih jauh dari harapan. Dan hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah masih belum melakukan pengelolaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangannya dengan baik. Selain itu juga dijelaskan masih ada kelemahan dalam pengendalian akuntansi dan pelaporan terkait dengan pencatatan dan pelaporan keuangan. Maka dari itu diperlukan posisi pengelola keuangan dalam hal ini bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD yang mampu menjalankan perannya dengan baik dan benar. Peran disini terkait

dengan tugas dan fungsinya sebagai bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD dalam mendukung proses penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang tertib, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

Tetapi kenyataannya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari bagian pelaporan pada bidang perbendaharaan, diperoleh data tentang penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran yang sangat memprihatinkan dimana dari 42 SKPD yang berada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi terdapat 6 (enam) SKPD yang tepat waktu antara 4-2

kali dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran selebihnya sebuah instansi selalu terlambat bahkan tidak ada penyampaian laporan pertanggungjawaban sama sekali. Dan hal ini termasuk dalam kategori temuan administrasi lainnya oleh pihak pemeriksa BPK.

Seharusnya seorang bendahara harus memahami mengenai tugas pokok, tanggung jawab, uraian pekerjaan, dan fungsi bendahara itu sendiri. Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya, dengan jelas disebutkan bahwa bendahara pengeluaran mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Karena pertanggungjawaban tersebut, merupakan bentuk dari akuntabilitas seorang pengelola keuangan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya sampai bulan februari 2015 dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD untuk Tahun Anggaran 2014 ternyata masih ada beberapa SKPD yang belum merampungkan laporan keuangannya dengan tepat waktu (*Kabid. Akuntansi Kabupaten Sigi*). Padahal proses akuntansi dan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan sudah merupakan tugas dari seorang PPK-SKPD untuk menyusun dan menyajikannya dengan tepat waktu.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Daerah harus mempunyai langkah-langkah taktis dan strategis untuk membenahi manajemen keuangan di tingkat daerahnya salah satunya adalah dengan memaksimalkan peran dari aparatur yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan dalam hal ini adalah bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD. Keberadaan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penanda tangan SPM, beserta unsur Penguji lainnya merupakan ujung tombak satuan kerja dalam meneliti tagihan, pengujian dokumen, verifikasi dokumen

beserta pendukungnya. Dimana dalam menjalankan perannya mereka harus mempunyai *knowledge, skill, dan Motivasi* (Warta Pengawasan 2012,22) untuk mendorong dan memacu perannya dalam sebuah status sebagai bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD. Meskipun masing-masing mempunyai peran dengan tugas dan fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dalam lingkungan satuan kerjanya.

Bendahara pengeluaran berperan pada proses penatausahaan pengeluaran dalam hal penatausahaan kas uang persediaan dan tambah uang serta pertanggungjawabannya, sedangkan PPK-SKPD berperan pada proses verifikasi, akuntansi SKPD hingga menyusun laporan keuangan. Jika masing-masing melaksanakan tugas dan poksinya secara benar, maka diharapkan akan mampu untuk memberikan sebuah kontribusi yang nyata bagi terciptanya pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik serta pelaporan yang tepat waktu. Sehingga mampu menghasilkan sebuah informasi yang andal dengan wujud sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi*”.

Berkaitan dengan hal yang telah diuraikan diatas, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Peran Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi.
2. Peran Bendahara Pengeluaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi.
3. Peran PPK-SKPD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian verifikatif yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dengan menggunakan analisis data bersifat statistik agar dapat menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2014:8). Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan pengaruh antara variabel peran bendahara pengeluaran dan peran pejabat penatausahaan keuangan-SKPD terhadap kualitas laporan keuangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi dengan jumlah 42 SKPD, yang terdiri dari Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor.

Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang menjadi bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD dengan jumlah 72 orang.

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi berganda, dengan program SPSS 16.0 model regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_nX_n + e$$

dimana
 Y = Kualitas laporan keuangan
 a = Konstanta
 b₁ – b₂ = Koefisien Regresi
 X₁= Peran Bend. Pengeluaran
 X₂= Peran PPK-SKPD
 e = kesalahan penganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Regresi

Dalam konteks penelitian ini Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh peran bendahara pengeluaran (X₁) dan peran pejabat penatausahaan keuangan-SKPD (X₂), terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sigi.

Sesuai hasil analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan bantuan komputer SPSS *For Wind Release* 16,0 diperoleh hasil-hasil penelitian dari 72 orang responden dengan dugaan pengaruh kedua variabel independen (peran bendahara pengeluaran dan peran pejabat penatausahaan keuangan-SKPD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sigi, dapat diketahui hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Dependen Variabel Y = Kualitas Laporan				
Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	T	Sig
C = Constanta	2,082	0,191	10,928	0,000
X ₁ = Peran Bendahara	0,446	0,051	5,562	0,000
X ₂ = PPK – SKPD	0,521	0,046	6,504	0,000
R-	= 0,763			
R-Square	= 0,582	F-Statistik	= 48,021	
Adjusted R-Square	= 0,570	Sig. F	= 0,000	

Sumber : Hasil regresi

Model regresi yang diperoleh dari tabel diatas adalah $Y = 2,082 + 0,446X_1 + 0,521X_2$ Persamaan tersebut menunjukkan, variabel independen yang dianalisis berupa variabel

(X₁, dan X₂.) memberi pengaruh terhadap variable independen (Y) model analisis regresi kualitas laporan keuangan Pemerintah

Daerah di Kabupaten Sigi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Untuk nilai constanta sebesar 2,082 berarti kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi sebelum adanya variabel independen adalah sebesar 2,082.
2. Peran bendahara pengeluaran (X_1) dengan koefisien regresi 0,446 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara peran bendahara pengeluaran dan kualitas laporan keuangan. Artinya semakin berperan bendahara pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi.
3. Pejabat penatausahaan keuangan-SKPD (X_2) dengan koefisien regresi 0,521 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara pejabat penatausahaan keuangan-SKPD dan kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik pejabat penatausahaan keuangan-SKPD yang ada pada pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan.

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Uji simultan adalah sebuah pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen (X) yang diteliti memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) berarti semua variabel bebasnya, yakni peran bendahara pengeluaran (X_1), dan pejabat penatausahaan (X_2), dengan variabel tidak bebasnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi yakni:

Tabel 4.10 terlihat hasil uji determinasi (kehandalan model) memperlihatkan nilai R-Square = 0,582 atau = 58,20%. Hal ini berarti bahwa sebesar 58,20% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh kedua variabel bebas, selebihnya variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.11 dari hasil perhitungan diperoleh $F_{hitung} = 48,021$

pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau $\alpha < 0,05$. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi $F = 0,000$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebasnya.

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa: Peran bendahara pengeluaran dan pejabat penatausahaan keuangan-SKPD secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi berdasarkan hasil Uji-F ternyata terbukti.

b. Pengujian Hipotesis Kedua dan Ketiga

Pengujian secara parsial dimaksudkan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya, sebagai berikut:

1. Peran bendahara pengeluaran (X_1)

Untuk variabel bendahara pengeluaran, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,446, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,000. Dengan demikian nilai sig t < 0,05 pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel peran bendahara pengeluaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi. Dengan demikian maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa: Peran bendahara pengeluaran berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

2. Pejabat penatausahaan keuangan-SKPD (X_2)

Untuk variabel pejabat penatausahaan keuangan-SKPD, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,521, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,000. Dengan demikian nilai sig t < 0,05 pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pejabat

penatausahaan keuangan-SKPD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi. Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa: Pejabat penatausahaan keuangan-SKPD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

guna memperoleh gambaran terhadap hasil penelitian ini, maka akan dilakukan pembahasan pada variabel penelitian peran bendahara pengeluaran dan peran pejabat penatausahaan keuangan-SKPD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sigi dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sigi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel peran bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sigi. Hal ini membuktikan bahwa bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik berdasarkan indikator-indikator pada variabel peran bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD yang dilakukan sehingga akan menunjang terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang relevan mengenai pengaruh peran bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum ditemukan, tetapi peran bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD ini terkait dengan tingkat pemahaman penatausahaan keuangan daerah dan proses implementasi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh seorang bendahara dan PPK-SKPD

dengan cara yang baik akan membantu terciptanya suatu penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Erna Sari (2013) dan Ovita Charolina (2013) yang menyatakan bahwa penatausahaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan dan implementasi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya penatausahaan pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran secara baik dan maksimal akan menghasilkan suatu LPJ bendahara yang merupakan bagian dari laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Adanya proses administrasi yang baik serta penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu akan sangat mendukung dalam terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.

2. Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sigi

Berdasarkan hasil uji regresi maka peran bendahara pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini memberikan makna bahwa semakin baik peran bendahara pengeluaran maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin meningkat.

Dari tanggapan responden yang merupakan pegawai sebagai bendahara pengeluaran pada variabel peran bendahara pengeluaran yang terdiri dari dimensi menerima uang, menyimpan uang, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan menunjukkan penilaian yang baik atau dalam kategori tinggi. Artinya pegawai yang menjadi pengelola keuangan dalam hal ini bendahara pengeluaran, harus memahami betul tentang proses penatausahaan keuangan khususnya penatausahaan pengeluaran kas yang

merupakan tugas dari seorang bendahara pengeluaran.

Penatausahaan pengeluaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan dokumen SPP, SPM dan SP2D baik UP, GU, dan TU maupun LS. Selanjutnya, bendahara pengeluaran menatausahakan belanja tersebut ke dalam BKU, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Panjar, Buku Rincian Objek Belanja dan Buku Register SPP-UP/GU/TU/LS. Pada akhir bulan, membuat laporan pertanggungjawaban baik yang fungsional maupun administratif. Semakin paham akan perannya dalam penatausahaan keuangan maka akan memberikan pengaruh yang besar bagi kinerja bendahara. Dimana pada akhirnya akan mendukung terhadap proses pengelolaan keuangannya dan akan mampu melahirkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Ovita Charolina (2013) yang menyatakan bahwa melalui pemahaman yang baik terhadap pedoman pengelolaan keuangan pada pegawai yang terlibat akan menunjang tersusunya laporan keuangan yang berkualitas.

Menambahkan hal diatas, Ivone Nilawati (2009) menyatakan bahwa kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara pengeluaran. Jika pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang berada dalam wewenang bendahara pengeluaran terdiri dari: (a) Pertanggungjawaban penggunaan UP; (b) Pertanggungjawaban penggunaan TU; (c) Pertanggungjawaban administratif; dan (d) Pertanggungjawaban fungsional. Karena jika ada keterlambatan dalam penyampaiannya, maka akan berpengaruh pada penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah antara lain diimplementasikannya dalam penyusunan laporan keuangan tahunan pemerintah

daerah, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan CaLK.

3. Pengaruh Peran PPK-SKPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sigi

Berdasarkan hasil uji regresi maka peran pejabat penatausahaan keuangan-SKPD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini memberikan makna bahwa semakin baik pejabat penatausahaan keuangan-SKPD dalam menjalankan tugasnya maka kualitas laporan keuangan juga akan meningkat.

Berdasarkan tanggapan responden yang juga merupakan pejabat penatausahaan keuangan-SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang memperkuat hasil analisis regresi diatas, dimana dari tanggapan responden atas peran pejabat penatausahaan keuangan-SKPD yang terdiri dari proses verifikasi, menerbitkan SPM, menjalankan fungsi akuntansi SKPD dan menyusun laporan keuangan menunjukkan penilaian yang sangat baik atau dalam kategori sangat tinggi. Artinya pegawai mengakui bahwa seorang pejabat penatausahaan keuangan-SKPD perlu memahami akan tugas sebagai fungsi tata usaha keuangan di SKPD dengan baik.

Dibawah bagian inilah fungsi verifikasi dan sekaligus akuntansi SKPD dilakukan. Dua output penting bagian ini adalah dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan Laporan Keuangan SKPD yang merupakan dokumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pemahaman akuntansi yang harus dimiliki oleh seorang PPK-SKPD. Karena ia akan lebih mudah dalam menerjemahkan setiap transaksi yang terjadi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Safrida Yuliani (2010) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi

yang dimiliki oleh PPK-SKPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin baik pemahaman akuntansi seorang PPK-SKPD maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dibuatnya.

PPK-SKPD harus memiliki kompetensi yang cukup dalam proses pencatatan dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya kompetensi yang memadai oleh para pelaksana akuntansi, maka nilai informasi yang tersaji dalam laporan keuangan akan semakin membaik sehingga menjadi pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan yang tepat. Menurut Yenita dalam Yuliarta (2013) kompetensi dalam melaksanakan fungsi ini terdiri dari: 1. Memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan tugas; 2. Peran dan tanggung jawab ditetapkan secara jelas dalam Peraturan Daerah; dan 3. Uraian tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Peran bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
2. Peran bendahara pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
3. Peran PPK-SKPD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan peran bendahara pengeluaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, perlu adanya penekanan yang lebih melalui pemahaman tugas dan fungsi seorang bendahara pengeluaran dalam bentuk dokumen pelaksanaan dan dipertegas oleh peraturan daerah.

2. Pihak SKPD maupun DPPKAD pada saat menunjuk bendahara pengeluaran harus ada penetapan kriteria-kriteria tertentu seperti wajib untuk mengikuti kursus kebendaharaan, harus memiliki Sertifikasi kebendaharaan, memiliki pemahaman akuntansi dasar yang cukup dan tingkat pendidikan yang memadai serta mampu mengoperasikan komputer.
3. Untuk meningkatkan peran pejabat penatausahaan keuangan-SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, perlu adanya pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia secara berkesinambungan melalui proses regenerasi pegawai.
4. Pejabat penatausahaan keuangan-SKPD mempunyai penguasaan terhadap sistem informasi berbasis teknologi, senantiasa update peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah serta menetapkan sistem dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan dan proses penyusunan laporan keuangan.
5. Pihak Pemerintah Daerah melalui DPPKAD menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan ataupun kursus tentang pengelolaan keuangan daerah. Terutama terkait dengan proses penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran serta penyusunan laporan keuangan untuk pejabat penatausahaan keuangan, dengan mengundang narasumber dari : Kemenkeu, Kemendagri maupun BPKP.
6. Pemerintah Daerah melalui DPPKAD memberikan sanksi yang tegas atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan laporan keuangan SKPD. Untuk memberikan efek jera bagi SKPD yang lambat dalam memberikan laporannya.
7. Bagi Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan jumlah sampel pada SKPD yang ada di beberapa Kabupaten agar hasil penelitian ini lebih dapat memberikan

gambaran tentang pengaruh peran bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD terhadap kualitas laporan keuangan yang dapat berguna bagi seluruh Pemerintah Kota. Disamping itu juga sebaiknya penelitian selanjutnya menyempurnakan kuesioner dengan memasukkan latarbelakang pendidika dan pemahaman SAP dalam kuesioner sebagai variable independen. Karena Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan supaya hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. sehingga yang juga perlu diperhatikan adalah latar belakang pendidikan, dimana pendidikan juga faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dari aparatur bagian keuangan SKPD khususnya jurusan akuntansi, maka akan membantu dalam menyusun laporan keuangan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengakui bahwa dalam penulisan artikel ini telah mendapat banyak bantuan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak terutama Ketua Tim pembimbing Prof. Dr. Andi Mattulada Amir, S.E., M.Si dan Anggota Tim Pembimbing Prof. Dr. H. Ridwan, S.E., M.Si., Ak., CA. Semoga artikel ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dikemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2012, Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMD dan APBD, *Warta Pengawasan*, hal. 22.
Buku 1, *Ikhtisar Hasil pemeriksaan Semester I tahun 2014*, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Erna Sari, 2013. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah, *Jurnal Fairness*, Volume 3

Nomor 3, ISSN: 2303-0348, Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu, hal. 19-29
Ivone Nilawati, 2009. Kajian Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008 (Studi Kasus 9 SKPD), *Tesis*, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
Mardiasmo, 2004, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Ovita Charolina, 2013. Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, *Jurnal Fairness* Volume 3, ISSN: 2303-0348, Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu, hal. 82-94
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
Safrida Yuliani, 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan SIAKD dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh), *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Volume 3, Nomor 2, Edisi Juli, Universitas Syiah Kuala, hal. 206-220
Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, CV. Alfabeta, Bandung.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
Yuliarta, 2013. Pengaruh Kompetensi Pejabat Pejabat Penatausahaan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengawasan Keuangan Daerah

terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang), *Artikel*, Program Studi Akuntansi,

Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat.